

---

---

## **KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAN KEBAKARAN DI KOTA BALIKPAPAN**

**Muhammad Fadillah Ghifari<sup>1</sup>; Komeyni Rusba<sup>2</sup>; Muhamad Ramdan<sup>3</sup>**

Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja  
Program Diploma IV, Universitas Balikpapan, Jl. Pupuk Raya,  
Gn. Bahagia Balikpapan 76114 Telp. (0542) 764205  
Email: fadillahghipari4@gmail.com<sup>1</sup>, komeyni@uniba-bpn.ac.id<sup>2</sup>,  
muhamad.ramdan@uniba-bpn.ac.id<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

Bencana merupakan fenomena atau peristiwa rusaknya alam atau lingkungan tempat tinggal yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan yang terjadi secara alamiah seperti banjir, kebakaran, gempa dan lain sebagainya Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemerintah melakukan penanggulangan bencana banjir dan kebakaran di kota Balikpapan. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif, Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dan disajikan dengan tahapan mengolah data dan menyiapkan data dengan analisis, hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Balikpapan Selatan telah menerapkan kebijakan penanggulangan bencana tetapi terdapat beberapa kriteria pada organisasi penanggulangan bencana dengan nilai kesesuaian 83% dan nilai ketidaksesuaian 17% yang berarti termasuk dalam kategori cukup, komponen yang ada tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Petugas tidak memiliki buku kegiatan. Prasarana yang berada di BPBD sudah dengan kategori cukup yaitu tingkat kesesuaian mencapai 85% dan nilai ketidaksesuaian mencapai 15% Dari semua komponen dan kondisi aktual hanya peralatan mobil ambulance yang belum terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Balikpapan dan nilai pada kegiatan evakuasi termasuk dalam kategori cukup dengan nilai kesesuaian mencapai 83% dan nilai ketidaksesuaian 17% Karena dari komponen yang ada tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Bahwa jalur evakuasi belum memiliki akses langsung ke ruangan terbuka yang aman. karena jalur evakuasi terdapat di daerah rawan bencana.

**Kata Kunci: Banjir, Bencana, BPBD, Kebijakan.**

---

---

### **ABSTRACT**

*Disasters are phenomena or events that damage nature or the living environment which has an impact on the lives of living things, namely humans, animals and plants that occur naturally, such as floods, fires, earthquakes and so on. The aim of this research is to find out how the government handles flood and fire disasters in cities. Balikpapan. The method used is a qualitative research method. Data collection techniques are research, interview guidelines, observation guidelines.*

*The data obtained is then analyzed and presented using the stages of processing the data and preparing the data with analysis, until finally a conclusion can be drawn. The research results show that the South Balikpapan BPBD has implemented disaster management policies but there are several criteria for the disaster management organization with a suitability value of 83% and a nonconformity value of 17%, which means it is included in the sufficient category. existing components do not correspond to actual conditions in the field. The officer does not have an activity book. The infrastructure in the BPBD is in the sufficient category, namely the conformity level reaches 85% and the nonconformity value reaches 15%. Of all the components and actual conditions, only ambulance equipment is not yet available at the Balikpapan City Regional Disaster Management Agency and the value of evacuation activities is included in the sufficient category. with a suitability value reaching 83% and a nonconformity value of 17% because the existing components do not match the actual conditions in the field. That the evacuation route does not yet have direct access to a safe open space. because the evacuation route is in a disaster-prone area.*

**Keywords: Floods, Disasters, BPBD, Policy.**

---

---

## **PENDAHULUAN**

Banjir Merupakan bencana besar di kota Balikpapan. Sejak tahun 2015, banjir menjadi prioritas permasalahan lingkungan hidup bagi Pemerintah Kota Balikpapan. Apalagi dari tahun 2009 hingga 2015 sudah ada terjadi peningkatan tutupan lahan untuk pemukiman di Kota Balikpapan sebesar 13,34%, dengan hanya 70% kapasitas drainase mampu menampung volume genangan setiap tahunnya meningkat. Daerah genangan banjir di Kota Balikpapan pada tahun 2014 tidak terdapat daerah yang terendam banjir. Namun, genangan luasnya meningkat menjadi 11,34 Ha pada tahun 2016.

Saat hujan, Kota Balikpapan bisamengalami banjir kedalamannya mencapai 1,5 meter akibat hujan yang terjadi selama 5 jam. Bencana banjir tentu berdampak kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas umum, dan pada akhirnya dapat menimbulkan korban jiwa. Sepanjang tahun 2016, sebanyak 88 kejadian banjir melanda Kota Balikpapan dengan 22 titik banjir. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan kejadian banjir sebanyak 89 dengan 51 lokasi banjir dimana salah satunya lokasi yang mempunyai tingkat kerawanan banjir tinggi adalah daerah pemukiman Damai Sungai Ampal. (Nursaiba.A. 2021).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Balikpapan Suseno (2017) mengungkapkan kejadian bencana kebakaran, tanah longsor maupun banjir pada tahun 2016 menunjukkan intensitas yang cukup tinggi. Hal ini didasari oleh fakta yang diperoleh dari data kejadian bencana yang terjadi pada rentang Januari - Desember 2016. Data menunjukkan kebakaran hutan dan lahan menempati jumlah kejadian tertinggi yaitu 98 kasus, selanjutnya banjir sebanyak 76 kasus, kebakaran pemukiman 35 kasus dan tanah longsor sebanyak 21 kasus. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang paling disoroti karena intensitas kejadiannya meningkat dua kali lipat bahkan dimulai sejak awal tahun 2019. (Banjarnahor, J., 2020).

Bencana merupakan fenomena atau peristiwa rusaknya alam atau lingkungan tempat tinggal yang berdampak pada kehidupan makhluk hidup yakni manusia, hewan maupun tumbuhan yang terjadi secara alamiah seperti banjir, tsunami, longsor, gempa dan lain sebagainya maupun bencana yang terjadi secara nonalamiah yang disebabkan oleh ulah tangan manusia yakni seperti kegagalan teknologi, adanya wabah penyakit, pembuangan sampah sembarangan yang mengakibatkan selokan menjadi tersumbat dan lain- lain. Dengan demikian, Pemerintah

Indonesia membuat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa badan yang menjadi pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang bertugas menanggulangi bencana lingkup nasional, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menanggulangi bencana yang terjadi pada daerah (Dwi, A., 2022).

Indonesia yang kaya sumber daya ditunjang anugerah tutorial yang luas dengan karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah wilayahnya. Tidak hanya itu bencana alamnya pun bermacam-macam jenis dan variasinya, dengan keberagaman magnitude. Serta frekuensi yang cenderung tinggi. Berdampak pada kepada masyarakat dalam jangka spontan maupun panjang timbulkan kerusakan serta kerugian yang tidak kecil bagi masyarakat bahkan hingga kematian atau cedera fisik maupun psikis seperti trauma di sebagian korban selamat, kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan dan lain- lain.

Bencana menurut penyebabnya dikategorikan atas dua tipe yang membedakan, dengan penyebab aktivitas alam secara natural sendiri, sebagai contoh puting beliung, angin topan, letusan gunung api, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam akibat perbuatan manusia (Marfuah, M., 2020). Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 24 Tahun 2007) Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 KM<sup>2</sup>, yang terdiri atas 503,30 KM<sup>2</sup> daratan dan 340,18 KM<sup>2</sup> perairan. Batas wilayah kota ini meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian Selatan dan Timur, serta Penajam Paser Utara pada Bagian Barat. Secara umum kota ini memiliki kontur wilayah yang umumnya berbukit (85%) dengan ketinggian antara 0 sampai dengan lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Sebagian besar jenis tanah Balikpapan adalah podsolik merah- kuning, alluvial, dan pasir kuarsa yang mudah tererosi. Di Balikpapan memiliki beberapa titik lokasi yang sering terjadi bencana banjir diantaranya, Jl. MT Haryono. Adapun beberapa penyebab banjir di lokasi tersebut umumnya terjadi akibat curah hujan yang sangat tinggi dan drainase tertutup oleh sampah dari limbah masyarakat, serta adanya kegiatan renovasi drainase sehingga menyebabkan banjir. Selain itu ada beberapa bencana yang sering terjadi di Balikpapan yakni bencana kebakaran dan tanah longsor.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagai suatu gambar kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang dialami. Penelitian ini menggambarkan fenomena badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir dan bencana kebakaran. Lokasi dan waktu penelitian dilakukan di Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Jalan Ruhui Rahayu, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur.

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan Oktober hingga November 2023. Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala BPBD kota Balikpapan karena Kepala BPBD merupakan pemberi otorisasi tertinggi setelah Kepala Pelaksana. Didukung

dengan beberapa informan lain seperti Kepala UPTD wilayah selatan dan tim regu penanggulangan bencana kota Balikpapan. Objek penelitian merupakan penjelasan tentang apa saja atau siapa saja yang menjadi objek penelitian dan juga dimana dan kapan penelitian ini dilakukan. Objek penelitian ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Balikpapan. Dalam penelitian ini terdapat 5 informan sebagai sumber informasi wawancara.

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diambil berdasarkan dari hasil wawancara secara langsung oleh peneliti kepada pihak responden dengan menggunakan alat bantu lembar wawancara serta form checklist. Observasi terkait fasilitas tanggap darurat bencana. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bekerja instrument dan pengumpulan data. Alat selain orang (seperti kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi) juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas untuk mendukung tugas peneliti sebagai alat sentral. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti sangat diperlukan karena peneliti harus berinteraksi baik dengan lingkungan manusia maupun dengan pemandangan yang ada. Alat pengumpulan data berarti alat atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan data.

Analisis data dimulai dengan mengolah data yang berasal dari data observasi lapangan, wawancara dari Badan Penanggulangan bencana daerah. Setelah data dianalisis, Langkah selanjutnya dilakukan dalam bentuk tabel dan narasi. Format tabel yang digunakan untuk menyajikan hasil adalah form dokumen dan hasil kontrol, sementara narasi digunakan untuk menyajikan hasil observasi untuk memberikan informasi yang jelas. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan bencana banjir dan kebakaran di kota Balikpapan. Deskriptif Presentase ini diolah dengan cara membandingkan kondisi actual lapangan dengan standar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Berdasarkan hasil wawancara**

Berdasarkan menteri Peraturan Pemetintah No. 21 Tahun 2008. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Balikpapan seharusnya mengadakan penambahan sarana dan prasana dalam penanggulangan bencana yang ada di Balikpapan. Sehingga bila terjadi bencana tim penanggulangan bencana dapat bekerja dengan tepat.

### **Berdasarkan Checklist organisasi**

Berdasarkan dari tabel checklist organisasi penanggulangan bencana terdapat nilai kesesuaian 83% dan 17% ketidaksesuaian. Karena dari komponen yang ada tidak sesuai dengan kondisi actual di lapangan. Petugas tidak memiliki buku kegiatan, seharusnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh tim penanggulangan bencana harus terjadwal agar kegiatan berjalan dengan lancar.

### **Berdasarkan Checklist prasarana**

Berdasarkan dari tabel checklist prasarana terdapat nilai 85% kesesuaian dan 15% ketidaksesuaian. Dari semua komponen dan kondisi actual hanya peralatan mobil ambulance yang belum terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Balikpapan.

### **Berdasarkan Checklist Evakuasi**

Berdasarkan dari tabel checklist evakuasi terdapat nilai kesesuaian 83% dan 17% ketidaksesuaian. Karena dari komponen yang ada tidak sesuai dengan kondisi actual

di lapangan. Bahwa jalur evakuasi belum memiliki akses langsung ke ruangan terbuka yang aman. Karena jalur evakuasi terdapat di daerah rawan bencana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara langsung tentang kebijakan penanggulangan bencana banjir dan kebakaran di kota Balikpapan dapat ditarik kesimpulan bahwa BPBD Balikpapan Selatan telah menerapkan kebijakan penanggulangan bencana tetapi terdapat beberapa kriteria pada organisasi penanggulangan bencana dengan nilai kesesuaian 83% dan nilai ketidaksesuaian 17% yang berarti termasuk dalam kategori cukup. Prasarana yang berada di BPBD sudah dengan kategori cukup yaitu tingkat kesesuaian mencapai 85% dan nilai ketidaksesuaian mencapai 15%, dan nilai pada kegiatan evakuasi termasuk dalam kategori cukup dengan nilai kesesuaian mencapai 83% dan nilai ketidaksesuaian 17%.

## SARAN

Saran dan ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Universitas Balikpapan yang telah mendukung penelitian dan penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banjarnahor, Joshua, Hayatul Khairul Rahmat, and Sri Kartika Sakti. 2020. "Implementasi Sinergitas Lembaga Pemerintah Untuk Mendukung Budaya Sadar Bencana Di Kota Balikpapan." Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 7(2):408–20.
- Dwi, Anita, Tri Yulianti, and Adi Susiantoro. 2022. "Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap Tanggap Darurat Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Administrasi Negara* 1(1):1–10.
- Marfuah, Marfuah, Sintia Cempaka, Ahmad Risdan Ardiansyah, Laila Rahmawati, Made Yunia Rediana, and Risandi Koswara. 2021. "Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana Di Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu Sosial Dan Politik* 1(1):35–45. doi: 10.35912/jasispol.v1i1.184.
- Nursaiba, A., and M. Ulimaz. 2021. "Assessment of the Level of Drainage Services in Damai Settlement Area (Ampal River Watershed), Balikpapan, Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 916(1). doi: 10.1088/1755-1315/916/1/012001.
- Nuryanto, N., Ramdan, M., & Anisyah, R. S. (2023). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Aktif Pada Coal Handling System PT Pembangkitan Jawa Bali Di Balikpapan. *Identifikasi*, 9(1), 731-738.
- Riki, R., Rusba, K., Setyawati, N. F., & Wahyuni, S. (2023). Pengetahuan Mahasiswa K3 Semester 8 Terhadap Perilaku Keamanan Pangan Di Kehidupan Sehari-Hari. *Identifikasi*, 9(2), 852-857.
- Rosyiid, M. H. A., Rusba, K., Pongky, P., & Swandito, A. (2023). Program Inspeksi Dalam Pencapaian Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di PT Hexindo Adiperkasa Tbk Balikpapan. *Identifikasi*, 9(2), 828-836.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.